

Laporan Pelaksanaan Anggaran untuk Mengukur Kinerja Finansial pada Organisasi Sektor Publik

Anggi Haerani¹, Khristina Sri Prihatin², Erni Irnawati³

Pendidikan Akuntansi, Universitas Banten Jaya

Serang, Banten

anggihaerani@unbaja.ac.id¹, khristinasriprihatin@unbaja.ac.id², erniirnawati02@gmail.com³

ABSTRACT

Society today is concerned about the performance of government agencies. There is often a public distrust of government, due to the fact that public agencies often use funds without proper planning, overspend, make frequent losses and do not always achieve set goals. The purpose of submitting financial statements in the public sector is to convey information about the resources, location, and use of funds. The information gathering strategies used by the researcher in this study included a literature review and field observations. In the process of data analysis, the author applied two approaches, namely descriptive method and deductive approach. from an economic point of view budget execution report to measure financial performance in public sector organisations is less economical because the realised expenditure is greater than the efficiency target. Some entities have improved efficiency over time by managing expenditure better than the target. While in terms of effectiveness, this shows the agency's ability to achieve the set revenue target, although some entities such as the Medan City Government have not been able to realise all potential revenue.

Keyword: Execution Report, Budget, Financial Performance, Public Sector Organisation, Efficiency, Effectiveness, Economy.

PENDAHULUAN

Dalam periode yang tidak terlalu lama, akuntansi sektor publik telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat ini, terdapat lebih banyak fokus pada cara-cara akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan milik negara atau daerah, lembaga pemerintah, serta berbagai organisasi publik lain jika dibandingkan dengan masa lalu. Publik mendesak perlunya keterbukaan dan tanggung jawab di lembaga-lembaga sektor publik.. (Dona & Lestari, 2020)

Setiap institusi pemerintah di Indonesia selalu memiliki tanggung jawab dan peran yang ditetapkan oleh undang-undang yang relevan. Namun, masyarakat masih kurang memahami informasi ini, karena kurangnya penyampaian mengenai fungsi masing-masing institusi tersebut kepada publik. Situasi ini berdampak pada penilaian kinerja setiap institusi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah untuk memperbaiki penyampaian informasi. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan jumlah informasi yang dapat dijangkau oleh individu-individu

yang memiliki keterkaitan kepentingan dengan lembaga publik.(Wicaksono, 2015) Masyarakat sekarang ini prihatin mengenai performa lembaga pemerintah. Terdapat sering ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah, disebabkan oleh fakta bahwa badan-badan publik kerap menggunakan dana tanpa perencanaan yang baik, mengeluarkan dana dalam jumlah berlebihan, lembaga sering mengalami kerugian dan tidak selalu mencapai sasaran yang ditetapkan. Inilah alasan mengapa masyarakat mendesak lembaga pemerintah untuk memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik terhadap layanan yang disediakan, agar masyarakat dapat memantau pelayanan yang seharusnya diterima.(Mukhamad Muslim Habibie et al., 2024)

Kinerja dalam konteks pengelolaan melibatkan perencanaan serta proses yang saling terhubung dan disatukan melalui lembaga, agar dapat menciptakan keterikatan antara strategi keseluruhan organisasi dan setiap individu secara terpisah. (Hasniasari & Sholihin, 2014) Pemerintah daerah diharapkan untuk memperbaiki distribusi dan keadilan, sehingga dapat memaksimalkan semua potensi yang terdapat di setiap wilayah. Dalam menjalankan otonomi wilayah, Pemerintah daerah perlu mengatur pemerintahan secara efisien dan efektif

untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Tingginya harapan akan kinerja dan tanggung jawab di tingkat daerah menuntut adanya pengukuran kinerja dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menciptakan indikator kinerja yang berkualitas.(Pilat & Morasa, 2017) Berdasarkan klasifikasinya, anggaran dibedakan menjadi anggaran operasional yang disusun untuk mencakup kegiatan utama yang bertujuan menghasilkan pendapatan dalam periode tertentu. Selain itu, ada juga anggaran modal yang menggambarkan cara organisasi menginvestasikan dana untuk aset tetap yang vital bagi operasional mereka dalam jangka panjang, seperti bangunan, peralatan, kendaraan, dan aset lainnya yang mempunyai umur manfaat lebih dari satu tahun, serta anggaran yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. (Syaifanur & Saleh, 2022)

Penelitian tentang penerapan anggaran berdasarkan kinerja di sektor publik biasanya fokus pada objek umum, sehingga kesimpulannya cenderung berupa penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari hasil perhitungan kuantitatif. Ini sangat membantu dalam memberikan arahan bagi penelitian anggaran berbasis kinerja ke area yang lebih khusus, yaitu realitas kehidupan.(Biswan & Grafitanti, 2021) Sudah banyak penelitian dilakukan

mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan warga setempat. Temuan dari penelitian memperlihatkan berbagai variasi yang signifikan di berbagai kawasan. Temuan dari penelitian memperlihatkan beragam variasi yang penting di berbagai wilayah. Beberapa studi menunjukkan adanya keterkaitan yang berlawanan, namun banyak juga yang mengungkapkan hasil yang positif. (Mahpudin & Lestari, 2021).

Implementasi Anggaran memberikan gambaran tentang asal, penyaluran, dan pemakaian dana. dalam wilayah pemerintahan federal atau kota. Dokumen ini menganalisis perbandingan antara penggunaan dana yang sebenarnya sepanjang periode laporan dengan anggaran yang direncanakan. Ini sejalan dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk Instansi Pemerintah. (Muhammad Arief Pramusty & Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, 2023)

Anggaran merupakan instrumen ekonomi yang paling krusial bagi pemerintah untuk memastikan keberlanjutan, memperbaiki standar hidup warga, dan mengarahkan pertumbuhan sosial serta ekonomi. (Putri & Munandar, 2021).

Definisi kinerja secara singkat dapat diartikan sebagai hasil dan tujuan dari suatu

organisasi, sejauh mana tugas-tugas dilaksanakan dengan baik, serta sejauh mana visi dan misi organisasi tercapai. (Putri & Munandar, 2021) Kinerja finansial suatu daerah adalah kemampuan wilayah tersebut untuk mencari sumber pemasukan lokal guna memberikan layanan kepada warga dan mengembangkan infrastruktur. Ini membuat wilayah tidak selalu harus bergantung pada dukungan dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengatur finansinya sesuai dengan peraturan yang ada serta dalam menjamin kelangsungan pemerintahan. (Putri & Munandar, 2021) Alat ukur yang dapat mengevaluasi kinerja meliputi selisih antara sasaran dan pelaksanaan anggaran yang diraih, keberhasilan program, efisiensi pengeluaran, serta distribusi dan keadilan. (Putri & Munandar, 2021)

Organisasi merupakan sekumpulan individu yang berkolaborasi untuk mendapatkan tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi melibatkan aktivitas yang dikoordinasikan di antara dua orang atau lebih, guna mengarahkan pelaksanaan dalam mencapai tujuan organisasi, di mana organisasi memanfaatkan tanggung jawab dan proses pengambilan keputusan. (Manurung & Mauliddina, 2021).

Akuntansi di bidang publik merupakan suatu sistem serta analisis yang digunakan untuk mengelola dana publik di instansi pemerintah pusat dan bawahannya, pemerintah daerah, perusahaan milik negara, perusahaan daerah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga Sosial, serta dalam kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta.(Daling, 2013).

Sistem penilaian kinerja di lingkungan publik merupakan sebuah metode yang dibuat untuk membantu manajer publik dalam mengukur efektivitas sebuah strategi dengan menggunakan indikator yang bersifat finansial dan non-finansial. Tujuan dari evaluasi dalam sektor publik adalah untuk mengoptimalkan efektivitas pemerintah. Ukuran kinerja di sektor publik berfokus pada membangun akuntabilitas publik serta meningkatkan komunikasi antar institusi. Selain itu, pengukuran kinerja di sektor publik juga diterapkan untuk distribusi sumber daya.(Pilat & Morasa, 2017).

Metode untuk menentukan pencapaian suatu entitas adalah melalui evaluasi kinerjanya. Kesuksesan instansi pemerintah dalam ranah publik akan mendapatkan penghargaan yang layak dari masyarakat. Perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada kinerja Pemerintah Pusat, sehingga kinerja Pemerintah Daerah

sering kali kurang diperhatikan.(Maryanti & Munandar, 2021).

Untuk mencapai hasil kerja yang baik, instansi di sektor publik memberikan dorongan yang kuat kepada karyawan mereka. Dorongan motivasi yang tinggi ini dapat membawa keuntungan bagi perkembangan organisasi melalui peningkatan kinerja. Namun, berdasar pada Penelitian yang dilaksanakan oleh Ilmawan (2017), Yulianingsih (2017), Andison dan Augustine (2017), Janah dan Rahayu (2015), serta Julyalahi (2017) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pembuatan anggaran tidak mempengaruhi performa manajemen. Beragam hasil dari studi ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam anggaran masih belum dapat diandalkan untuk dirumuskan sebagai suatu kesimpulan yang jelas. (Ermawati, 2017).

Tujuan dari penyampaian laporan keuangan dalam sektor publik adalah untuk menyampaikan informasi tentang sumber daya, lokasi, dan pemakaian dana. menggambarkan metode yang digunakan oleh suatu entitas untuk mendapatkan dana guna operasional dan memenuhi kebutuhan kas, menyajikan data yang signifikan untuk menilai kapasitas entitas dalam mendukung kegiatan serta memenuhi tanggung jawab dan komitmen, melaporkan rincian tentang situasi keuangan entitas serta transformasi yang berlangsung, serta juga menyajikan

data secara umum yang penting untuk mengevaluasi kinerja organisasi dari sudut pandang biaya layanan, efektivitas, dan pencapaian sasaran. (Dien et al., 2015).

Otonomi regional terlihat dari tingkat Rasio kemandirian yang ada. Semakin tinggi rasio kemandirian suatu wilayah, semakin berkurang ketergantungan pada bantuan eksternal, khususnya dari pemerintahan pusat dan provinsi, dan sebaliknya. Halim (2012) mengungkapkan bahwa kemandirian finansial suatu daerah dapat diukur dari Pendapatan asli daerah (PAD) berkaitan dengan penerimaan dari berbagai sumber lainnya, seperti bantuan yang disediakan oleh pemerintah pusat (pengalihan dari pusat) atau kredit. Rasio kemandirian menunjukkan seberapa banyak masyarakat terlibat dalam pembangunan daerah. Ketika rasio kemandirian mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa kontribusi masyarakat di bidang pajak dan retribusi daerah, yang merupakan aspek penting dari pendapatan asli daerah, juga semakin meningkat. Bertambahnya jumlah pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat menandakan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat pun semakin membaik. (Anggaran & Pandawa, 2016)

Tidak dapat disangkal bahwa budget sangat berperan penting dalam manajemen akuntansi. Kasdin (2017) menegaskan bahwa anggaran mengubah rencana yang

bersifat umum dan abstrak menjadi operasional, merupakan alat untuk mendistribusikan sumber daya dalam organisasi serta mendorong akuntabilitas tanggung jawab. Ada beberapa alasan mengapa anggaran nasional kini tidak lagi memadai, di antaranya adalah sifat anggaran yang tidak realistis dan sangat mahal, serta meningkatnya praktik manipulasi angka yang sudah melampaui batas dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang mendesak. (Biswan & Widiyanto, 2019)

Pemerintah perlu melakukan transformasi dari metode anggaran konvensional ke metode baru yang dikenal dengan anggaran berbasis kinerja. Banyak pemerintah daerah yang masih menerapkan sistem anggaran lama, dan ini menjadi isu yang seharusnya mendapat perhatian serius untuk memenuhi tuntutan reformasi dalam pengelolaan keuangan publik. Anggaran konvensional yang biasa digunakan oleh pemerintah daerah cenderung lebih menitikberatkan pada perencanaan anggaran yang bersifat Line-Item dan Incremental, di mana dalam proses penyusunannya hanya merujuk pada pelaksanaan anggaran dari tahun sebelumnya. Akibatnya, tidak terdapat perubahan yang berarti pada tahun anggaran yang akan datang. (Ismid et al., 2020)

METODE

Strategi pengumpulan informasi yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini mencakup tinjauan literatur dan pengamatan di lapangan. Dalam proses analisis data, penulis menerapkan dua pendekatan yang dijelaskan sebagai berikut:

- Deskriptif Metode deskriptif dalam kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai sejarah lembaga, susunan organisasi, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian.
- Pendekatan deduktif sering diterapkan dalam penelitian kuantitatif, dimana para peneliti berusaha untuk menentukan hubungan sebab akibat dan melakukan analisis statistik..(Manurung & Mauliddina, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel yang membahas tentang laporan realisasi anggaran pada sektor publik diperoleh dari 10 jurnal yang bersumber dari google scholar, jurnal-jurnal tersebut sebagai berikut:

1. Judul : Tinjauan laporan pelaksanaan untuk menilai performa keuangan di kantor pemerintah daerah kabupaten OKU, 2020

Penulis: Eka Meiliya Dona dan Verza Ayu Lestari

Metode: Deskriptif kuantitatif

Kesimpulan:

- Persentase dan kriteria belanja ekonomi dalam realisasi pengeluaran Badan Pendapatan daerah OKU dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan variasi. Rata-rata persentase ekonomi untuk rentang waktu 2013-2017 adalah 89,48, yang termasuk dalam kategori 80%-90%, yang mengindikasikan situasi cukup ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU beroperasi dengan cukup efisien, karena anggaran pengeluaran mereka melebihi realisasi yang menandakan pemerintahan mempunyai kemampuan yang baik dalam pengelolaan pengeluaran. Tingkat efisiensi dari belanja yang direalisasikan berbanding dengan pendapatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU sepanjang tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan efisiensi dari waktu ke waktu. Rata-rata efisiensi antara tahun 2013 hingga 2017 adalah 62,58%, yang termasuk dalam kisaran 60%-80%, menunjukkan bahwa hal ini tergolong efisien.

Dapat dikatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU efisien, karena pendapatan yang diterima dari pajak daerah melebihi pengeluaran untuk pemungutan pajak daerah, yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan yang baik dalam memaksimalkan pendapatan dan belanja.

- Kriteria dan tingkat efisiensi anggaran dan pencapaian pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU dari tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan bahwa penerimaan PAD tetap konsisten setiap tahun. Rata-rata efektivitas sepanjang periode 2013-2017 adalah 114,39%, yang menandakan hasil lebih dari 100% dan tergolong sangat efektif. Hasil ini mengisyaratkan bahwa performa keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. telah mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, menunjukkan bahwa pemerintah sangat mampu dalam merealisasikan Rancangan pemasukan yang sudah disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. (Dona & Lestari, 2020)

2. Judul : Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai tingkat ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja keuangan blud, 2022

Author : Fitria Syaifanur dan Muhammad Saleh

Metode : Deskriptif kuantitatif

Kesimpulan :

- Pelaksanaan anggaran di BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin tidak menunjukkan hasil yang positif dalam hal keuangan.
- Pelaksanaan anggaran di BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin tidak berlangsung dengan efisien.
- Pelaksanaan anggaran di BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin berjalan dengan baik.(Syaifanur & Saleh, 2022)

3. Judul : Analisis Laporan Ringkasan Realisasi Anggaran untuk Menilai Prestasi Keuangan di Kantor Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, 2022

Penulis: Khadijah Dinda Putri Dewi dan Arninda Wahyuni Lubis

Metode: Deskriptif kuantitatif

Kesimpulan:

- Penilaian finansial di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 hingga 2021 mengindikasikan

bahwa hasil anggaran pendapatan pada tahun 2021 kurang memuaskan. Namun, jika diperhatikan sepanjang periode 2018-2021, kinerjanya tergolong baik.

- Dilihat dari tingkat desentralisasi, penilaian tentang Kinerja Keuangan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara antara tahun 2018 hingga 2021 memperlihatkan persentase mencapai 100%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rasio ini berada pada kategori sangat baik, yang mencerminkan bahwa kinerja Kantor Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Utara sangat memuaskan.
- Dengan rata-rata persentase 90,15%, performa keuangan untuk belanja daerah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara selama 2018-2021 menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah, dan tidak ada realisasi anggaran yang melebihi anggaran yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan langkah-langkah yang efisien dalam pengelolaan belanja.
- Dengan memanfaatkan rasio efektivitas PAD di Kantor Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2018-2021, kinerja keuangan pendapatan daerah dinyatakan efektif dengan rata-rata rasio persentase sebesar 120,43%, yang tergolong dalam kelompok yang sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat berhasil memenuhi sasaran pendapatan anggaran.

- Dari analisis kecocokan pengeluaran, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara antara tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan rata-rata rasio sebesar 83,02%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio kesesuaian belanja berada dalam kategori sangat sesuai. Kesimpulannya, Pengeluaran rutin di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2018 hingga 2021 tercatat pada angka yang signifikan. (Dewi & Lubis, 2022)
4. Judul : Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan, 2023
- Author : Muhammad Arief Pramusty dan Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan

Kesimpulan :

Keberhasilan anggaran daerah Pemerintah Kota Medan terlihat melalui analisis variasi pendapatan, rasio derajat desentralisasi, efektivitas pajak daerah, dan analisis variasi anggaran selama tahun 2018-2022. Tinjauan perubahan pendapatan dari 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih rendah dari yang diproyeksikan, mengindikasikan bahwa pemerintah Medan belum berhasil dalam mencapai target pendapatannya. (Muhammad Arief Pramusty & Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, 2023)

5. Judul : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektivitas, Dan Efisiensi Terhadap Kinerja Keuangan Blud RSUD Sleman Kabupaten Sleman, 2024

Penulis: Nur Azizah, dkk.

Kesimpulan:

- Penggunaan anggaran di BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman tidak ekonomis. Penggunaan anggaran di BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman tidak efisien.
6. Penggunaan anggaran di BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman
Judul : Analisis realisasi anggaran

dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja di puslitbang jalan dan jembatan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat kota bandung, 2019

- efisien. (Nur Azizah et al., 2024)

Author : Hani Hatimatunnisani dan Dewi Purwanti Kosasih

Kesimpulan :

- Selama periode 2013 sampai 2017, analisis efektivitas memperlihatkan bahwa rata-rata pencapaian adalah 103,80%. Ini menunjukkan bahwa efektivitas Puslitbang Jalan dan Jembatan di Kota Bandung dapat dinilai sangat baik. Ini juga menandakan bahwa Puslitbang Jalan dan Jembatan di Kota Bandung telah sukses memenuhi sasaran pendapatan yang ditentukan oleh pemerintah.
- Selama periode 2013 hingga 2017, analisis efisiensi menunjukkan rata-rata hasil yang dicapai adalah 94,60%. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi kinerja Puslitbang Jalan dan Jembatan di Kota Bandung masih tergolong rendah. Ini juga menunjukkan bahwa Puslitbang Jalan dan Jembatan Kota Bandung belum berhasil dalam menekan pengeluaran dan cenderung memanfaatkan seluruh anggaran

yang telah di tetapkan.
(Hatimatunnisani & Kosasih, 2019)

7. Judul : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021, 2022

Author : Ruqidu Hajah Alhabsi, dkk.

Kesimpulan :

Dilihat dari analisis tentang rasio efektivitas PAD, kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang di tahun 2019 dinilai masih kurang optimal. Selanjutnya, antara tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Kabupaten Magelang telah memperbaiki pengelolaan PAD-nya, sehingga hasilnya dikategorikan sangat efektif. Berdasarkan penghitungan rasio efektivitas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang berhasil mencapai sasaran penerimaan PAD dengan tingkat efektivitas yang melebihi seratus persen. Kinerja serta anggaran pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Magelang selama tahun anggaran 2019-2021 dinilai cukup efisien, dengan dukungan dari perhitungan rasio efisiensi yang menunjukkan bahwa Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang memanfaatkan anggaran belanja sesuai dengan tujuannya, walaupun dengan tingkat efisiensi di bawah 100%. (Ruqidul Hajah Alhabsi et al., 2023)

8. Judul : Analisis Laporan Realisasi anggran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor otoritas bandar udara wilayah VI Padang, 2023

Penulis: Dety Lafera dan Septia Lestari Maniza

Metode : Deskriptif Kuantitatif

Kesimpulan:

- Melalui analisis varians, pengeluaran terkait kinerja finansial menunjukkan bahwa terdapat penurunan dalam efisiensi anggaran di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang pada tahun 2021 hingga 2022 mencatatkan nilai sebesar Rp. 432.926.638. Angka ini mencerminkan penurunan efisiensi anggaran sebesar 62,23%. Selama periode tersebut, hasil analisis belanja menunjukkan penurunan, yang menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang telah berhasil melakukan pengurangan anggaran untuk biaya

karyawan dan pengadaan barang melalui perencanaan yang efektif.

- Dari sudut pandang Rasio Efektivitas, kinerja keuangan menunjukkan peningkatan dalam tingkat efektivitas di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang pada periode 2021-2022 meraih angka 98.66%. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang sukses dalam mengelola unit usaha pemerintah, atau dapat dikatakan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan pendapatan yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengingat pencapaian anggaran pendapatan yang signifikan ketika dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga kinerja unit kerja dinilai efisien.
- Melihat dari Rasio Efisiensi, ada peningkatan dalam tingkat efisiensi di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang antara tahun 2021-2022 yang mencapai 2.03%. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang telah melakukan penghematan dalam anggaran belanja untuk pengeluaran pegawai dan belanja barang, dan ini juga diperkuat dengan fakta bahwa

realisasi anggaran harus sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan, sehingga kinerjanya dapat dianggap efisien. (Lafera & Septia Lestari Maniza, 2024)

9. Judul : Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan kantor camat liukang kalmas kab. Pangkep, 2024

Author : Miftahul Rahmah, dkk.

Kesimpulan :

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa performa Kantor Camat Liukang Kalmas di Kab. Pangkep, jika dilihat dari rasio efisiensi, menunjukkan hasil yang berbeda-beda: pada tahun 2019 tercatat 97,85%, kemudian 98,75% di tahun 2020, 95,56% pada tahun 2021, 98,75% di tahun 2022, dan 98,40% pada tahun 2023. Jika kita menilai berdasarkan tabel pengukuran tingkat efisiensi, angka-angka ini mengindikasikan Kinerja finansial Kantor Camat Liukang Kalmas di Kab. Pangkep dinilai kurang efisien Selama lima tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2019 sampai 2023. Di samping itu, apabila dilihat dari perbandingan efektivitas, kinerja Kantor Camat Liukang Kalmas di Kab. Pangkep

menghasilkan angka-angka sebagai berikut: 102,19% pada 2019, 101,26% pada 2020, 104,64% di 2021, 101,25% pada 2022, dan 101,61% pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kantor Camat Liukang Kalmas di Kab. Pangkep telah sangat efektif, dan efektivitas ini konsisten selama lima tahun, dari 2019 hingga 2023. Mengingat kondisi tersebut, diharapkan bahwa Kantor Camat Liukang Kalmas di Kab. Pangkep dapat melakukan perbaikan dalam kinerja pelaporan keuangan terkait rasio efisiensi, serta dapat mempertahankan kinerja keuangannya yang efektif dalam aspek pelaporan keuangan berdasarkan rasio efektivitas.(Pemerintah et al., 2024)

10. Judul : Analisis Anggaran dan Pencapaian untuk Menilai Kinerja Finansial di PT PLN (PERSERO)

Author : Tria Intan Meilinda, dkk.

Kesimpulan :

Pada periode 2019 hingga 2020, berdasarkan pencapaian anggaran perusahaan, kondisi perusahaan tampak tidak memuaskan. Dilihat dari Rasio lancar, perusahaan menunjukkan performa yang buruk dengan skor yang sangat rendah. Ini

menandakan bahwa perusahaan tidak berhasil memberikan hasil yang baik terhadap investasi yang dimiliki, yang tentunya menjadi sinyal negatif bagi para investor yang memiliki niat untuk menanamkan modal pada perusahaan. Mengenai periode penagihan, perputaran persediaan, TATO, dan TSM terhadap modal sendiri, mengalami stabilitas setiap tahun. Semakin lama periode penagihan, menunjukkan bahwa perusahaan belum mengoptimalkan proses penagihan piutang. Indikator ini menjadi semakin positif saat jumlah hari yang dihasilkan semakin sedikit. Sementara itu, perputaran persediaan menggambarkan waktu yang diperlukan perusahaan untuk memutar persediaan. Sama halnya dengan periode penagihan, semakin kecil hasil dari perputaran persediaan, menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dan efektif dalam mengelola persediaannya. Hal ini tentu dapat mengurangi pengeluaran biaya.(Tria Intan Meilinda et al., 2024)

KESIMPULAN

1. Ekonomi:

- Beberapa instansi dinilai cukup ekonomis, seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU (89,48% rata-rata) dan Kantor Otoritas Bandar Udaa VI Padang yang menghemat anggaran belanja pegawai dan barang. Namun, ada instansi seperti BLUD RSUD Sleman dan RSUD dr. Zainoel Abidin yang dinilai kurang ekonomis karena realisasi pengeluaran lebih besar dari target efisiensi.

2. Efisiensi:

- Tingkat efisiensi bervariasi. Beberapa instansi seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU menunjukkan efisiensi (62,58%), sedangkan Puslitbang Jalan dan Jembatan (94,6%) serta Kantor Camat Liukang Kalmas (97%-98%) menunjukkan efisiensi yang kurang memadai.
- Beberapa entitas mengalami peningkatan efisiensi dari waktu ke waktu dengan mengelola pengeluaran lebih baik dibandingkan target.

3. Efektivitas:

- Sebagian besar instansi mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU (114,39%) dan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera

Utara (120,43%). Hal ini menunjukkan kemampuan instansi dalam mencapai target pendapatan yang ditetapkan, meskipun beberapa entitas seperti Pemerintah Kota Medan belum mampu merealisasikan seluruh potensi pendapatan.

4. Rekomendasi Umum:

- Pentingnya penggunaan indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara terpadu dalam menilai kinerja keuangan untuk perencanaan anggaran yang lebih baik.
- Perbaikan efisiensi, terutama di instansi yang masih menunjukkan tingkat efisiensi rendah, seperti RSUD dan Puslitbang Jalan dan Jembatan, diperlukan agar anggaran dapat digunakan secara optimal.
- Penguatan strategi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar instansi sektor publik menunjukkan kinerja yang efektif dalam mencapai target pendapatan, masih terdapat kelemahan dalam efisiensi dan ekonomi yang perlu diperbaiki untuk mendukung pengelolaan anggaran yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran, T., & Pandawa, J. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. 1(1), 40–54.
- Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2021). Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 35–56. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.368>
- Biswan, A. T., & Widiyanto, H. T. (2019). Peran Beyond Budgeting Entry Scan Untuk Mengatasi Permasalahan Penganggaran Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 308–327. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10018>
- Daling, M. (2013). Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA*, 1(3), 82–89.
- Dewi, K. D. P., & Lubis, A. W. (2022). Analisis Laporan Ikhtisar Realisasi Anggaran Untuk Menilai Pencapaian Kinerja Keuangan Pada Kantor Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 111–120. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i1.15>
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Walandouw, S. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534–541.
- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2877>
- Ermawati, N. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Skpd Kabupaten Pati). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 141. <https://doi.org/10.30659/jai.6.2.141-156>
- Hasniasari, R., & Sholihin, M. (2014). Analisis Hubungan Penganggaran Partisipatif dan Kinerja: Pengujian Efek Mediasi Keadilan Persepsian dan Komitmen pada Lembaga Hukum Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1), 23–32. <https://doi.org/10.9744/jak.16.1.23-32>
- Hatimatunnisani, H., & Kosasih, D. P. (2019). Analisis Realisasi Anggaran dalam Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja di Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(1), 78–90.
- Ismid, F., Kusmanto, H., & Lubis, M. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 129–140. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.53>
- Lafera, D., & Septia Lestari Maniza. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 97–106. <https://doi.org/10.62194/vk2tk392>

- Mahpudin, M., & Lestari, F. M. (2021). Analisis Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah: Kasus Apbd Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018-2020. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2).
<https://doi.org/10.31506/jap.v12i2.11284>
- Manurung, K. M., & Mauliddina, F. (2021). Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Global Manajemen*, 10(2), 87.
<https://doi.org/10.46930/global.v10i2.1813>
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis value for money untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota surabaya tahun anggaran 2015-2019 jimea | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2886–2899.
- Muhammad Arief Pramusty, & Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan. (2023). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 150–164.
<https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i4.341>
- Mukhamad Muslim Habibie, Gatot Wahyu Nugroho, & Andri Indrawan. (2024). Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Value For Money dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik: Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(9), 7186–7208.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i9.4434>
- Nur Azizah, Miranti, Tyarasya Salsabila Putri, & Sarah Rolian. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektivitas, Dan Efisiensi Terhadap Kinerja Keuangan Blud RSUD Sleman Kabupaten Sleman. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 753–762.
<https://doi.org/10.62504/jimr709>
- Pemerintah, K., Trenggalek Arini, K., & Loekman, Z. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. *Jurnal IAKP*, 5(1), 1103–1108.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Accountability*, 6(1), 45.
<https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kotamalang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 5(3), 2296–2313.
- Ruqidul Hajah Alhabsi, Nuwun Priyono, & Risma Wira Bharata. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 212–222.
<https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.523>
- Syaifanur, F., & Saleh, M. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektivitas, Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Blud. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 252–258.

<https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.21153>

Tria Intan Meilinda, Ihsan Izzuddin
Febrianto, Intan Novindiyani, Anissa
Fadillah, & Maria Vebrianti
Bonavantore. (2024). Analisis
Anggaran Dan Realisasi Untuk
Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT.
PLN (PERSERO). *Journal of
International Multidisciplinary
Research*, 2(6), 234–243.
<https://doi.org/10.62504/jimr567>

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas
Organisasi Sektor Publik. *JKAP
(Jurnal Kebijakan Dan Administrasi
Publik)*, 19(1), 17.
<https://doi.org/10.22146/jkap.7523>

